

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia, maka terlebih dahulu peneliti mengamati dan mencermati hasil penelitian sebelumnya yaitu:

Erika Apulina Sembiring (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2007-2014”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Inpres Desa Tertinggal Manusia Di Kabupaten Dan Kota Propinsi Sumatera Utara selama tahun 20014-2007. Penelitian ini menggunakan teknik metode data panel. Berdasarkan metode data panel di dapatkan sampel 22 kabupaten dan kota dari 25 kabupaten dan 8 kota di Provinsi Sumatera Utara dengan periode 2007-2014. Variabel independen dalam penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan variabel Dependennya yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel atau Pooling Least Square (PLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. (Sembiring, 2019)

Ida Ayu Tari Purnama Sasti dan Made Yenni Latrini (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Alokasi Belanja Operasi Dan Belanja Modal Pada Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2013-2017)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh alokasi belanja operasi dan belanja modal pada indeks pembangunan manusia. Penelitian ini dilakukan di 9 kabupaten/kota di provinsi bali dengan menggunakan teknik sampel jenuh dan menghasilkan jumlah sampel sebanyak 45 amatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belanja operasi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. (Sasti & Latrini, 2019)

Sri Ramadhani dan Cahyo Utomo (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Dan Dana Bantuan Pemerintah Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2018)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi dan bantuan pemerintah dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. Penelitian ini dilakukan di 15 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan melakukan metode uji asumsi klasik sebelum mengumpulkan metode penelitian terbaik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah serta dana alokasi berpengaruh secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia dan hasil uji hipotesisnya menunjukkan adanya pengaruh signifikan

variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. (Ramadhani & Utomo, 2019)

Yustina Asnad Hobrouw, I Gusti Ngurah Agung Suaryana dan I G.A.M. Asri Dwija Putri (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris Pengaruh pendapatan Asli Daerah pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Barat dan untuk mengetahui secara empiris pengaruh Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Barat. Penelitian ini dilakukan di 14 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia dan belanja modal juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. (Hobrouw, Suaryana, & Putri, 2021)

Andi Maujung Tjodi, Try Oldy Rotinsulu, dan George M.V Kawung (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Di Provinsi Sulawesi Utara). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur (path analysis) yang

merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan pada penelitian sub-sektor I, pengeluaran pemerintah dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian sub-sektor II, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan dan belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. (Tjodi, Rotinsulu, & Kawung, 2018)

Penelitian yang akan dilakukan tidak jauh berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021. Perbedaannya terdapat pada variabel penelitian yaitu menggunakan 2 variabel dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai X_1 dan Belanja Modal sebagai X_2 dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagai Y . Serta perbedaan pada subjek penelitian yaitu Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori merupakan seperangkat definisi, konsep dan proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian yang akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Landasan teori merupakan dasar dari sebuah penelitian yang perlu ditegaskan

supaya suatu penelitian memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (trial and error). (Sugiyono 2012:52)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Pendapatan Asli Daerah dan Modal Belanja kemungkinan memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Teori Indeks Pembangunan Manusia dijadikan sebagai teori utama (*Grand Theory*) dalam penelitian ini. Karena pembangunan bersifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Istilah pembangunan (*Development*) secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan nasional bruto atau Gross National Product (GNP) tahunan pada tingkat katakanlah 5 hingga 7 persen atau bahkan lebih tinggi lagi, jika hal itu memang memungkinkan (Todaro, 2000). Pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an dan 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasikan pertumbuhan Gross National Product (GNP) saja tidak akan mampu memecahkan permasalahan pembangunan secara mendasar di negara berkembang.

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

dalam periode tahun bersangkutan. Sedangkan menurut Pemendagri No.21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Pemendagri No.31 Tahun 2006 adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian, ada pendapat yang mengatakan pendapatan asli daerah sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan ini bersumber dari empat jenis pemasukan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan pendapatan sah lain-lain.

Pendapat dari Warsito (2001) “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah” (Warsito, 2001).

Dalam pasal 285 UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa

imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah memiliki fungsi yang sama dengan pajak yang lainnya yaitu sebagai sumber pendapatan (*budgetary*) dan sebagai alat ukur (*regulatory*). Menurut UU No. 28 tahun 2009 jenis pajak daerah dibagi menjadi:

a. Pajak Daerah Provinsi yang terdiri dari:

- Pajak kendaraan bermotor
- Bea balik nama kendaraan bermotor
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- Pajak air pemukiman
- Pajak rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota

- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak hiburan
- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak pengunjung bahan galian golongan C
- Pajak mineral bukan logam dan hantam
- Pajak parkir
- Pajak sarang burung walet
- Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

2. Retribusi Daerah

Selain pajak daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar perannya adalah retribusi daerah yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dengan adanya retribusi daerah tersebut dapat langsung ditunjuk. Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan di daerahnya.

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengeluaran keuangan daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut (Halim dan Kusufi 2013:102).

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintahan daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Contoh objek yang termasuk dalam retribusi jasa umum pemerintah provinsi adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pengujian kendaraan

bermotor, retribusi penggantian beban cetak peta, retribusi ulang dan retribusi pendidikan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial. Contoh objek yang termasuk dalam retribusi jasa usaha pemerintah provinsi yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi jasa usaha tempat pelelangan, retribusi jasa usaha penginapan dan lain sebagainya.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan pelayanan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam (SDA), barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contoh retribusi perizinan tertentu pemerintah provinsi adalah retribusi izin proyek, retribusi izin usaha perikanan dan sebagainya.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengeluaran kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut pendapatan yaitu:

- a. Bagian laba atas penyerahan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyerahan modal pada perusahaan milik negara/BUMN

- c. Bagian laba atas penyerahan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lain-lain Yang Sah

Pendapatan yang termasuk penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah daerah atas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tujuan didirikannya adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil

pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah. Dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah. Dan juga merupakan alat pemasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal tidak terlepas dari adanya tahun yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut.

2.2.2 Belanja Modal

Menurut Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang manfaatnya bisa dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Perdirjen Nomor PER-33/PB/2008 Belanja Modal di pergunakan antara lain:

- a. Belanja Modal Tanah

Seluruh pengeluaran dan biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, serta pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban tanah pada saat pembebasan/ pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut digunakan.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Perolehan untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasi dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, irigasi, dan lain-lain)

f. Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/ perolehan/ pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU).

2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak

Sejak tahun 1990, United National Development Programme (UNDP) mengembangkan sebuah indeks kinerja pembangunan yang kini dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (Human Development Index). Pendekatan pembangunan manusia dikembangkan pertama kali oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang berarti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan konsep yang mendasari pembangunan untuk mencapai kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan. Upaya untuk menyejahterakan masyarakat di dalam pembangunan manusia mencakup tiga komponen dasar yaitu peluang hidup (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan hidup layak (pendapatan).

Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai ini diukur berdasarkan indikator sebagai acuannya, yaitu:

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Indeks Harapan Hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun.

b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Dengan menggunakan asumsi bahwa rata-rata lama sekolah dalam suatu wilayah tidak menurun dan cakupan penduduk yang berusia 23 tahun ke atas.

c. Pengeluaran Riil Per Kapita Yang Disesuaikan

United National Development Programme (UNDP) mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

d. Tingkat Pendidikan

Indikator yang digunakan dalam mengukur indeks pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (Mean Years of Schooling – MYS) dan angka melek huruf. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), di mana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis, sedang cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan untuk penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

e. Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson. Perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakan PDB per kapita, karena PDB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional

(SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (Purchasing Power Parity).

Konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menetapkan peringkat kinerja manusia pada skala 0,0-100,0 dengan kategori seperti Indeks Kualitas Hidup (IKH) , Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini juga digunakan untuk melakukan pemeringkatan terhadap kinerja pembangunan berbagai negara di dunia. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) negara-negara di dunia ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah (Low Human Development) bila memiliki nilai IPM antar 0 sampai 0,50
- b. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia menengah (Medium Human Development) bila memiliki nilai IPM antar 0,50 sampai 0,79
- c. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (High Human Development) bila memiliki nilai IPM antara 0,79 sampai 1

Setiap komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rumus yang digunakan sebagai berikut:

Rumus:

a. Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

b. Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

c. Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

d. Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

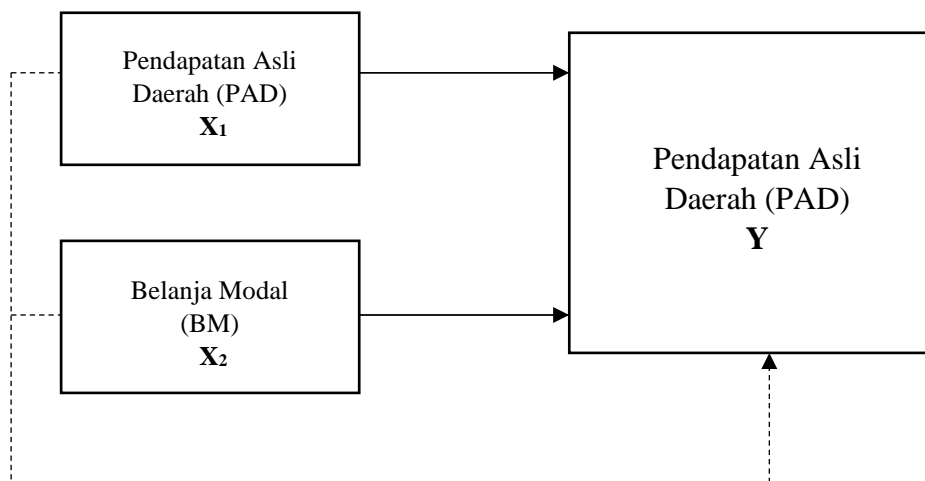
$$IPM = \sqrt[n]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

2.3 Kerangka Berpikir

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Tanggung jawab pemerintahan terhadap masyarakat adalah memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan anggaran belanja modal yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah. Pergeseran komposisi belanja digunakan untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan kelayakan fasilitas publik yang akan memberikan kenaikan pajak,, yang akan masuk salah satu sumber Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam model pemikiran sebagai berikut:

Gambar kerangka berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis

Pengertian hipotesis penelitian menurut Sugiono (2019:99) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang telah diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis dari rumusan masalah penelitian.

- a. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut BPS (2016), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen

dasar kualitas hidup. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM).

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erika Apulina Sembiring (2019) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

b. Hubungan Belanja Modal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Pemendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Strategi alokasi pengeluaran daerah dalam bentuk belanja modal akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Pengalokasian Belanja Modal yang berhubungan dengan pembangunan manusia di suatu daerah seperti di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarumingkeng, Rimate, & Rotinsulu (2018), Hobrouw, Suaryana & Putri (2021) memperoleh hasil penelitian bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂ : Belanja Modal (BM) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

c. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Sukirno (2000) yang dikutip Bahrudin (2011) pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara

menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang mencerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk nasional dan untuk daerah/regional (Bahrudin & Khasanah, 2011). Namun di Jawa Timur tidak menjamin apakah seluruh Kota dan Kabupaten memiliki kualitas yang baik untuk menunjukkan apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal (BM) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hobrouw, Suaryana & Putri (2021) memperoleh hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal (BM) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)